
Proyek Mercusuar Bung Karno : Antara Prestise dan Beban Ekonomi di Era Demokrasi Terpimpin 1959-1966

Wulandari^{a, 1}*, Eko Ribawati^{b, 2}

^{a,b} Jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kota Serang, Indonesia

¹ 2288230044@untirta.ac.id ; ² eko.ribawati@untirta.ac.id;

*Corresponding Author

Abstrak

Penelitian ini mengkaji Proyek Mercusuar pada masa Demokrasi Terpimpin (1959–1966) sebagai bagian dari strategi politik dan ideologis Presiden Sukarno dalam menampilkan Indonesia sebagai bangsa besar dan berdaulat di tingkat internasional. Pembangunan proyek-proyek monumental seperti Monumen Nasional (Monas), Stadion Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, serta penyelenggaraan Games of the New Emerging Forces (GANEFO) dimaknai sebagai upaya membangun prestise nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan politik global dunia ketiga. Penelitian ini menggunakan metode historis yang meliputi tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di balik nilai simbolik dan politis yang kuat, proyek mercusuar membawa konsekuensi ekonomi yang signifikan. Mekanisme pembiayaan yang bergantung pada kredit luar negeri serta pemanfaatan dana pampasan perang Jepang sebesar 223,08 juta dolar AS memperbesar pengeluaran negara di tengah kapasitas ekonomi nasional yang terbatas. Kondisi tersebut berkontribusi pada meningkatnya inflasi, menurunnya cadangan devisa, serta memburuknya stabilitas fiskal negara. Proyek-proyek mercusuar yang bersifat non-produktif dalam jangka pendek juga tidak memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan Proyek Mercusuar pada masa Demokrasi Terpimpin berada pada persimpangan antara ambisi politik, prestise kebangsaan, dan realitas ekonomi nasional.

Kata kunci: Proyek Mercusuar, Sukarno, Demokrasi Terpimpin, beban ekonomi.

Abstract

This study examines the Lighthouse Project during the Guided Democracy era (1959–1966) as part of President Sukarno's political and ideological strategy to present Indonesia as a great and sovereign nation on the international stage. The construction of monumental projects such as the National Monument (Monas), Gelora Bung Karno Stadium, Hotel Indonesia, Semanggi Bridge, and the hosting of the Games of the New Emerging Forces (GANEFO) were interpreted as efforts to build national prestige while strengthening Indonesia's position in the global political arena of the Third World. This study uses historical methods that include heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The results of the study show that behind their strong symbolic and political value, these flagship projects had significant economic consequences. The financing mechanism, which depended on foreign credit and the utilization of Japanese war reparations amounting to US\$223.08 million, increased state expenditure amid limited national economic capacity. These conditions contributed to rising inflation, declining foreign exchange reserves, and worsening fiscal stability. Non-

productive lighthouse projects in the short term also did not have a direct impact on improving people's welfare. These findings confirm that the Lighthouse Project policy during the Guided Democracy era was at a crossroads between political ambition and national prestige.

Keywords : The Lighthouse Project, Sukarno, Guided Democracy, economic Burden.

PENDAHULUAN

Masa Demokrasi Terpimpin (1959–1966) merupakan periode penting dalam sejarah politik Indonesia ketika Presiden Sukarno berupaya mengonsolidasikan kekuasaan dan mewujudkan cita-cita revolusi nasional. Dalam sistem politik yang menempatkan dirinya sebagai pemimpin tunggal revolusi, Sukarno berusaha menampilkan Indonesia sebagai bangsa besar yang berdaulat, mandiri, dan disegani di mata dunia. Salah satu manifestasi dari gagasan tersebut diwujudkan melalui serangkaian pembangunan berskala besar yang dikenal sebagai Proyek Mercusuar. Pembangunan berbagai fasilitas monumental seperti Stadion Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, Monumen Nasional (Monas), dan Gedung DPR/MPR mencerminkan semangat besar untuk memperlihatkan kemajuan bangsa kepada dunia internasional (Astuti, 2023).

Sukarno meyakini bahwa bangsa yang baru merdeka harus berani menunjukkan identitas dan martabatnya di hadapan negara-negara lain. Melalui proyek-proyek mercusuar, ia ingin menjadikan Indonesia sebagai mercusuar dunia ketiga penunjuk arah bagi negara-negara yang baru lahir dari penjajahan. Konsep ini erat kaitannya dengan politik luar negeri *New Emerging Forces* (NEFO) yang ia gagas, serta menjadi bagian dari upaya untuk menandingi dominasi kekuatan Barat (Old Established Forces atau OLDEFO). Di sisi lain, proyek-proyek tersebut juga berkaitan dengan event internasional seperti Asian Games IV 1962 dan *Games of the New Emerging Forces* (GANEFO) 1963, yang menjadi sarana bagi Sukarno memperkuat posisi Indonesia di panggung dunia dan memperkenalkan gagasan politik anti-imperialisme melalui medium olahraga dan kebudayaan (Budita, 2024).

Namun di balik semangat nasionalisme dan idealisme tersebut, proyek-proyek mercusuar tidak lepas dari kritik. Pembangunan yang bersifat monumental membutuhkan biaya besar di tengah kondisi ekonomi nasional yang rapuh, inflasi tinggi, dan rendahnya daya beli masyarakat. Banyak kalangan menilai bahwa proyek mercusuar lebih merepresentasikan ambisi politik dan pencitraan prestise Sukarno dibandingkan dengan kebutuhan riil masyarakat (Arif Ramadhan, 2018). Sementara itu, sebagian sejarawan berpendapat bahwa pembangunan tersebut justru menjadi simbol kebangkitan bangsa dan alat diplomasi internasional yang efektif, karena berhasil menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara maju dari sisi pembangunan fisik dan arsitektur modern (Chairudin dkk., 2023).

Kritik lain muncul dari perspektif sosial dan ekonomi rakyat. Dalam pembangunan Stadion Gelora Bung Karno misalnya, terjadi relokasi paksa terhadap warga Senayan ke Tebet, yang menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat. Hal ini memperlihatkan bagaimana proyek-proyek besar pada masa itu memiliki dua sisi: di satu pihak menegaskan martabat bangsa, di pihak lain membebani kondisi ekonomi nasional. Dilema inilah yang

menjadikan proyek mercusuar menarik untuk dikaji, sebab ia merepresentasikan pertemuan antara idealisme politik, ambisi pembangunan, dan realitas ekonomi yang saling berkaitan.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya menyoroti proyek mercusuar sebagai simbol politik, diplomasi internasional, atau representasi nasionalisme Sukarno, penelitian ini menempatkan proyek mercusuar dalam kerangka analisis beban ekonomi negara pada masa Demokrasi Terpimpin (1959–1966). Fokus penelitian tidak hanya pada makna simbolik pembangunan monumental, tetapi juga pada mekanisme pembiayaan, tekanan fiskal, inflasi, serta dampak sosial-ekonomi yang dirasakan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi celah kajian yang belum banyak menelaah konsekuensi ekonomi proyek mercusuar secara terukur dan kontekstual.

Perdebatan mengenai hubungan antara kebanggaan nasional dan kesejahteraan rakyat tetap relevan hingga saat ini, terutama ketika pembangunan proyek berskala besar kembali menjadi strategi negara dalam membangun citra nasional dan pertumbuhan ekonomi. Kajian-kajian terbaru menunjukkan bahwa pembangunan monumental tanpa perhitungan ekonomi yang matang berpotensi menimbulkan ketimpangan fiskal dan tekanan sosial yang serupa dengan pengalaman masa Demokrasi Terpimpin (Astuti, 2023; Budita, 2024). Oleh karena itu, kajian historis terhadap proyek mercusuar tidak hanya penting sebagai rekonstruksi masa lalu, tetapi juga sebagai refleksi kritis bagi arah kebijakan pembangunan di masa kini agar tidak mengorbankan kesejahteraan masyarakat demi simbol prestise negara.

METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini, metode yang digunakan adalah metode sejarah. Menurut Kuntowijoyo (2003), metodologi sejarah mencakup empat tahapan utama, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada peristiwa masa lalu, khususnya kebijakan pembangunan Proyek Mercusuar pada masa Demokrasi Terpimpin (1959–1966), beserta dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkannya.

Tahap pertama adalah heuristik, yaitu pengumpulan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan topik penelitian. Sumber yang digunakan meliputi sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa dokumen resmi negara seperti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 1961 tentang Pembentukan Panitia Monumen Nasional dan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1965 mengenai pembangunan kompleks gedung parlemen (MPR/DPR/DPD), serta arsip dan catatan perseorangan yang memuat data sosial dan ekonomi pada masa tersebut. Sementara itu, sumber sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal ilmiah, dan karya akademik yang membahas Proyek Mercusuar, kebijakan ekonomi Sukarno, serta konteks politik internasional pada era Demokrasi Terpimpin.

Tahap kedua adalah kritik sumber, yang dilakukan untuk menilai keaslian (kritik eksternal) dan kredibilitas isi sumber (kritik internal). Kritik eksternal bertujuan memastikan autentisitas dokumen, seperti tahun penerbitan, lembaga penerbit, dan konteks historis pembuatannya. Kritik internal

dilakukan dengan menelaah isi sumber, kecenderungan ideologis penulis, serta relevansinya terhadap fokus penelitian, khususnya dalam membahas aspek pembiayaan proyek mercusuar dan dampaknya terhadap kondisi ekonomi nasional.

Tahap ketiga adalah interpretasi, yaitu proses penafsiran terhadap data dan fakta sejarah yang telah melalui tahap kritik sumber. Pada tahap ini, penulis menganalisis keterkaitan antara pembangunan proyek-proyek mercusuar dengan kebijakan ekonomi dan politik pada masa Demokrasi Terpimpin. Data mengenai mekanisme pembiayaan, inflasi, defisit anggaran, serta dampak sosial seperti relokasi penduduk dianalisis secara kontekstual untuk memahami makna dan implikasinya terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu penyusunan hasil penelitian dalam bentuk narasi sejarah yang sistematis, logis, dan koheren. Pada tahap ini, hasil interpretasi disajikan dalam bentuk uraian deskriptif-analitis yang menempatkan Proyek Mercusuar sebagai fenomena historis yang tidak hanya bernilai simbolik dan politis, tetapi juga memiliki konsekuensi ekonomi dan sosial yang signifikan. Penyajian historiografi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai paradoks pembangunan pada masa Demokrasi Terpimpin, khususnya hubungan antara ambisi politik dan realitas ekonomi Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proyek-Proyek Mercusuar pada Masa Demokrasi Terpimpin

Pada masa Demokrasi Terpimpin (1959–1966), pembangunan proyek-proyek besar yang disebut Proyek Mercusuar menjadi lambang utama dari semangat nasionalisme yang digagas oleh Presiden Sukarno. Ia berusaha menegaskan kepada dunia bahwa Indonesia, sebagai bangsa yang baru merdeka, mampu berdiri sejajar dengan negara-negara maju melalui pencapaian monumental di bidang arsitektur, olahraga, dan kebudayaan. Proyek seperti Monumen Nasional (Monas), Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, serta penyelenggaraan Games of the New Emerging Forces (GANEFO) menjadi representasi konkret dari upaya Sukarno menjadikan Indonesia sebagai “mercusuar dunia ketiga” yang menerangi bangsa-bangsa Asia-Afrika dalam menghadapi dominasi Barat.



Gambar 1. Sukarno sedang menunjukkan proyek Stadion Gelora Bung Karno ke tamu negara didampingi Menteri Negara Pemuda dan Olahraga R. Maladi

Sumber: Dari Gelora Bung Karno ke Gelora Bung Karno (*kompas.com*)

Menurut Budita (2024), GANEFO merupakan puncak dari politik simbolik Sukarno yang ingin membangun solidaritas global di antara negara-negara baru merdeka melalui olahraga. GANEFO bukan sekadar ajang olahraga, melainkan manifestasi ideologis dari semangat anti-imperialisme dan perlawanan terhadap tatanan dunia lama (OLDEFO). Dalam pidatonya, Sukarno bahkan menyebut GANEFO sebagai “manifestasi dunia baru yang bebas dari kolonialisme dan kapitalisme.” Melalui ajang ini, Indonesia memperkenalkan dirinya sebagai negara pemimpin gerakan non-blok dan penegak keadilan global.

Pembangunan Monas, yang dimulai pada 1961, juga mengandung simbolisme serupa. Trihanondo (2022) menyebutkan bahwa Monas tidak hanya berfungsi sebagai tugu peringatan perjuangan kemerdekaan, tetapi juga sebagai lambang kebangkitan nasional yang “menembus langit” metafora bagi cita-cita Indonesia untuk menjulang di antara bangsa-bangsa. Dalam konteks ini, proyek mercusuar memiliki makna politik dan kultural yang mendalam, yaitu memperlihatkan kepercayaan diri bangsa muda yang baru pulih dari trauma penjajahan.



Gambar 2. Potret pembangunan Monumen Nasional (Monas) yang belum rampung.

Sumber: *merdeka.com*, 2023

Dari hasil penelusuran literatur, peneliti melihat bahwa proyek-proyek mercusuar berfungsi ganda: di satu sisi sebagai pernyataan politik yang menunjukkan kedaulatan dan martabat bangsa, di sisi lain sebagai sarana pendidikan nasional dalam membangun rasa kebanggaan kolektif. Dalam konteks pendidikan sejarah, proyek-proyek ini dapat dipahami sebagai alat pembentukan memori

2. Dampak Ekonomi Proyek Mercusuar dan Mekanisme Pembiayaan

Meskipun memiliki nilai simbolik yang tinggi, proyek mercusuar juga menimbulkan persoalan ekonomi yang signifikan. Rizaldy (2020) mencatat bahwa pembiayaan proyek-proyek besar ini sebagian besar berasal dari utang luar negeri dan pengeluaran negara yang besar, di tengah situasi ekonomi yang tidak stabil. Inflasi meningkat tajam hingga ratusan persen pada awal 1960-an, sementara sektor produksi nasional belum mampu mengimbangi laju pengeluaran negara.

Akibatnya, kesejahteraan rakyat tidak banyak meningkat meskipun proyek-proyek monumental terus dikerjakan. Pembiayaan proyek-proyek mercusuar pada masa Demokrasi Terpimpin tidak sepenuhnya berasal dari anggaran domestik, melainkan banyak ditopang oleh dana luar negeri. Salah satu sumber penting yang terlihat dalam data infografis adalah dana pampasan perang Jepang, yang

diberikan kepada Indonesia melalui Perjanjian San Francisco. Indonesia menerima kompensasi sebesar 223,08 juta dolar AS, yang dibayarkan selama dua belas tahun dengan pola 20 juta dolar AS per tahun serta tambahan 3,08 juta dolar AS pada tahun terakhir. Dana ini kemudian dialokasikan untuk membangun sejumlah proyek besar seperti Hotel Indonesia, Sarinah, Gelora Bung Karno, Wisma Nusantara, Jembatan Semanggi, hingga Jembatan Ampera di Palembang. Proyek-proyek ini bertujuan menampilkan citra Indonesia sebagai negara yang modern dan berpengaruh.

Namun, penggunaan dana pampasan Jepang bukan satu-satunya skema pembiayaan yang ditempuh pemerintah. Di luar kompensasi Jepang, pemerintah juga banyak mengandalkan pembiayaan dari kredit luar negeri, terutama dari negara-negara blok Timur seperti Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok. Bentuk kredit yang diberikan mencakup kredit barang, jasa konstruksi, teknologi, dan tenaga ahli untuk pembangunan berbagai fasilitas monumental. Ketergantungan pada kredit luar negeri tersebut menyebabkan beban fiskal meningkat karena pemerintah harus menanggung kewajiban pembayaran kredit dan berbagai biaya pendukungnya.

Konsekuensi fiskal dari pola pembiayaan ini cukup signifikan. Pengeluaran negara untuk proyek-proyek monumental semakin memperlebar defisit anggaran, sementara cadangan devisa terus menurun akibat tingginya kebutuhan impor bahan dan peralatan pembangunan. Selain itu, banyak proyek mercusuar bersifat non-produktif secara ekonomi dalam jangka pendek, sehingga tidak memberikan pemasukan langsung bagi negara. Kondisi ini mendorong pembengkakan tanggungan fiskal sekaligus mempersempit kemampuan negara untuk membiayai kebutuhan ekonomi yang lebih mendesak. Pada akhirnya, pola pembiayaan proyek mercusuar pada periode 1959–1966 berkontribusi pada memburuknya stabilitas ekonomi nasional menjelang pertengahan 1960-an.

Selain berdampak pada stabilitas fiskal negara, proyek mercusuar pada masa Demokrasi Terpimpin juga menimbulkan konsekuensi sosial-ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Salah satu contoh paling jelas terlihat dalam pembangunan Stadion Gelora Bung Karno (GBK) di Senayan. Berdasarkan penelitian Muhammad Rizaldy, Abdul Syukur, dan Humaidi (2020), pembangunan kompleks stadion tersebut menyebabkan relokasi besar-besaran penduduk yang sebelumnya bermukim di kawasan Senayan dan sekitarnya. Dengan merujuk pada arsip perseorangan Sutikno Lukitodisastro, mereka mencatat bahwa sebanyak 6.545 rumah penduduk harus dipindahkan untuk keperluan pembangunan kawasan olahraga, jalan, serta fasilitas pendukung Asian Games IV 1962.

Relokasi tersebut mencakup beberapa wilayah, antara lain Kampung Senayan, Slipi, Menteng Pulo, dan Tebet yang dijadikan daerah penampungan. Proses pemindahan ini menunjukkan bahwa pembangunan proyek mercusuar tidak hanya menyerap anggaran negara dalam jumlah besar, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat kelas bawah. Banyak warga kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan tanpa diiringi peningkatan kesejahteraan yang sepadan. Dalam konteks ini, proyek mercusuar memperlihatkan ketegangan antara tujuan simbolik negara untuk membangun citra nasional dan realitas sosial rakyat yang harus menanggung biaya sosial dari kebijakan pembangunan tersebut (Rizaldy, Syukur, & Humaidi, 2020).

Temuan ini memperkuat argumen bahwa proyek mercusuar pada masa Demokrasi Terpimpin tidak sepenuhnya bersifat netral secara ekonomi dan sosial. Meskipun berhasil menciptakan simbol prestise nasional dan meningkatkan posisi Indonesia di panggung internasional, pembangunan tersebut juga memperbesar beban ekonomi negara dan menciptakan penderitaan sosial di tingkat akar rumput. Dengan demikian, proyek mercusuar dapat dipahami sebagai kebijakan pembangunan yang sarat kepentingan politik, tetapi kurang memperhatikan aspek keberlanjutan ekonomi dan keadilan sosial.

Astuti (2023) menegaskan bahwa orientasi pembangunan pada masa Demokrasi Terpimpin lebih menonjolkan citra politik ketimbang keseimbangan ekonomi. Pembangunan terpusat di Jakarta sebagai simbol kemajuan, sedangkan wilayah lain relatif tertinggal. Hal ini menciptakan ketimpangan spasial antara pusat dan daerah, serta memperlihatkan bahwa proyek mercusuar lebih berfungsi sebagai sarana legitimasi politik Sukarno untuk mempertahankan citra di dalam dan luar negeri.

Namun, jika dilihat dari perspektif politik internasional, strategi ini memiliki rasionalitas tersendiri. Dalam situasi Perang Dingin, Sukarno berupaya memposisikan Indonesia sebagai kekuatan alternatif di antara dua blok besar dunia, yaitu Barat dan Timur. Melalui pembangunan monumental dan kegiatan internasional seperti GANEFO serta rencana CONEFO (Conference of the New Emerging Forces), Sukarno berusaha menegaskan identitas Indonesia sebagai pemimpin dunia baru yang mandiri dari pengaruh ideologi global

Dari hasil analisis, peneliti melihat Proyek Mercusuar pada masa Demokrasi Terpimpin, seperti pembangunan Monumen Nasional, Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, dan Gedung MPR, memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Pengeluaran negara yang masif untuk proyek-proyek prestisius ini tidak diimbangi dengan pendapatan memadai, sehingga menimbulkan inflasi tinggi dan harga kebutuhan pokok melambung, sementara daya beli rakyat menurun. Anggaran negara terkuras untuk proyek-proyek mercusuar, sehingga sektor ekonomi produktif dan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pembangunan jalan, pasar, dan infrastruktur penting lainnya, terabaikan. Fokus pada proyek monumental ini juga menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, di mana sektor industri dan infrastruktur dasar kurang berkembang, memicu meningkatnya kemiskinan dan pengangguran. Kondisi krisis memaksa pemerintah melakukan devaluasi mata uang dan menambah utang luar negeri, memperparah beban keuangan negara. Dampak-dampak tersebut akhirnya mengikis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, karena meskipun proyek mercusuar menjadi simbol prestise nasional, manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari masyarakat sangat terbatas. Peneliti juga melihat bahwa Bung Karno menggunakan proyek mercusuar sebagai alat untuk menggabungkan nasionalisme, politik luar negeri, dan diplomasi budaya. Lewat bangunan-bangunan monumental itu, pemerintah ingin menyampaikan pesan bahwa Indonesia adalah negara yang percaya diri dan berani tampil di tingkat global. Dampak ekonominya memang cukup berat, tetapi proyek-proyek tersebut tetap dianggap penting untuk membentuk citra Indonesia di mata dunia, terutama dalam konteks persaingan politik global pada masa Perang Dingin.

3. Temuan Spesifik Dampak Ekonomi Proyek Mercusuar terhadap Stabilitas Nasional

Berdasarkan hasil penelusuran sumber-sumber primer dan sekunder, ditemukan bahwa proyek-proyek mercusuar pada masa Demokrasi Terpimpin tidak hanya berdampak simbolik, tetapi juga menimbulkan tekanan ekonomi yang terukur. Salah satu indikator utama adalah tingkat inflasi yang meningkat secara drastis. Data ekonomi menunjukkan bahwa pada awal 1960-an inflasi Indonesia mencapai lebih dari 200% per tahun, dan pada pertengahan dekade bahkan melonjak hingga di atas 600%, terutama dipicu oleh tingginya pengeluaran negara yang tidak sebanding dengan kapasitas produksi nasional.

Pembiayaan proyek-proyek mercusuar seperti Stadion Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, dan Monumen Nasional menyerap anggaran negara dalam jumlah besar. Sebagian besar dana pembangunan berasal dari utang luar negeri, terutama dari Uni Soviet, Republik Rakyat Tiongkok, serta dana pampasan perang Jepang sebesar 223,08 juta dolar AS. Walaupun dana pampasan Jepang dialokasikan untuk pembangunan fisik, penggunaannya tetap menimbulkan beban lanjutan berupa biaya operasional, impor material, serta ketergantungan pada tenaga ahli asing.

Dampak langsung dari kondisi ini dirasakan oleh masyarakat melalui kenaikan harga kebutuhan pokok. Harga beras, minyak tanah, dan tekstil mengalami peningkatan signifikan, sementara upah riil masyarakat tidak mengalami kenaikan sepadan. Hasil kajian menunjukkan bahwa daya beli masyarakat perkotaan maupun pedesaan mengalami penurunan tajam, sehingga proyek-proyek mercusuar tidak memberikan manfaat ekonomi langsung bagi kehidupan sehari-hari rakyat.

Selain itu, proyek mercusuar bersifat non-produktif dalam jangka pendek, karena tidak menghasilkan pemasukan negara yang signifikan. Berbeda dengan sektor pertanian atau industri manufaktur, bangunan monumental lebih berfungsi sebagai simbol politik dan diplomasi. Akibatnya, alokasi anggaran negara menjadi timpang: sektor-sektor produktif dan pelayanan publik, seperti pangan, transportasi rakyat, dan infrastruktur dasar daerah, kurang mendapat perhatian memadai.

Temuan ini memperlihatkan adanya kontradiksi kebijakan pembangunan pada masa Demokrasi Terpimpin. Di satu sisi, negara berupaya membangun citra Indonesia sebagai kekuatan besar di tingkat internasional; di sisi lain, kebijakan tersebut justru memperparah ketidakstabilan ekonomi domestik. Kondisi ini akhirnya mendorong pemerintah melakukan berbagai langkah darurat, seperti devaluasi mata uang dan penambahan utang luar negeri, yang semakin memperberat beban ekonomi nasional menjelang runtuhnya Demokrasi Terpimpin.

Secara keseluruhan, proyek mercusuar dapat dipahami sebagai fenomena yang memiliki banyak dimensi. Selain membawa konsekuensi ekonomi yang signifikan, proyek-proyek ini juga mengandung makna politik, ideologis, dan kultural. Pembangunan mercusuar mencerminkan adanya paradoks dalam kebijakan pembangunan pada masa Demokrasi Terpimpin, yaitu antara keinginan menonjolkan prestise bangsa dan kenyataan beban ekonomi yang harus ditanggung negara. Meskipun memberikan tekanan ekonomi, proyek-proyek tersebut tetap meninggalkan jejak penting dalam sejarah Indonesia sebagai simbol semangat kebangsaan dan arah pembangunan pada masa itu.

KESIMPULAN

Proyek Mercusuar pada masa Demokrasi Terpimpin (1959–1966) merupakan manifestasi dari visi besar Presiden Sukarno dalam menegakkan martabat bangsa dan menempatkan Indonesia sebagai kekuatan baru di kancah internasional. Pembangunan monumental seperti Monumen Nasional, Stadion Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, serta penyelenggaraan GANEFO tidak hanya berfungsi sebagai simbol kebanggaan nasional, tetapi juga sebagai instrumen politik luar negeri dan diplomasi budaya dalam konteks Perang Dingin.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa di balik nilai simbolik dan ideologis tersebut, proyek-proyek mercusuar menimbulkan beban ekonomi yang signifikan bagi negara. Mekanisme pembiayaan yang bergantung pada kredit luar negeri serta pemanfaatan dana pampasan perang Jepang sebesar 223,08 juta dolar AS menyebabkan meningkatnya pengeluaran negara di tengah kapasitas ekonomi nasional yang terbatas. Kondisi ini berkontribusi terhadap memburuknya stabilitas fiskal, meningkatnya inflasi yang mencapai ratusan persen pada awal hingga pertengahan 1960-an, serta menurunnya daya beli masyarakat.

Selain dampak makroekonomi, proyek mercusuar juga memunculkan konsekuensi sosial-ekonomi, seperti relokasi penduduk dalam pembangunan Stadion Gelora Bung Karno yang tidak diiringi peningkatan kesejahteraan rakyat. Proyek-proyek tersebut bersifat non-produktif dalam jangka pendek sehingga tidak mampu memberikan kontribusi langsung terhadap penerimaan negara maupun perbaikan ekonomi masyarakat luas. Akibatnya, pembangunan monumental lebih banyak berfungsi sebagai simbol prestise politik dibandingkan sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, Proyek Mercusuar dapat dipahami sebagai kebijakan yang berada pada persimpangan antara ambisi politik, kebanggaan nasional, dan realitas ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. Meskipun meninggalkan warisan simbolik dan historis yang kuat, proyek-proyek tersebut juga memperlihatkan paradoks pembangunan, yaitu ketegangan antara upaya membangun citra bangsa di tingkat global dan kemampuan ekonomi domestik yang terbatas. Temuan ini menegaskan pentingnya menempatkan kebijakan pembangunan tidak hanya dalam kerangka simbolik dan ideologis, tetapi juga dalam pertimbangan keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Ramadhan, W. (2018). *Pemikiran Sukarno Dalam Pembangunan Ibu Kota Jakarta Pada Masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1962-1964*.
- Astuti, I. T. T. (2023). Proyek Mercusuar: Langkah Politik Atau Keegoisan Sukarno Pasca Kemerdekaan. *Jurnal Kalacakra: Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(2), 89–99.
- Budiman, H. (2020). *Sudah Senja di Jakarta*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Budita, C. A. (2024). Ganefo I 1963 di Jakarta: Manifestasi Kekuatan Baru dalam Olahraga, Politik, dan Persaingan Global. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1(3).
- Chairudin, M., Nurhanifa, N., Yustianingsih, T., Aidah, Z., Atoillah, A., & Hadi, M. S. (2023). Studi literatur pemanfaatan aplikasi Assemblr Edu sebagai media pembelajaran matematika jenjang SMP/MTs. *Communnity Development Journal*, 4(2), 1312–1318.
- Hardiyanti Hr, S. R. I. (2018). Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asian Games Iv Tahun 1962 (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Hartono, R., & Ilyas, U. (2013). *Bung Karno: Nasionalisme, Demokrasi & Revolusi*. PT Berdikari Nusantara Makmur.
- Kembaren, E. E. K. (2021). Sukarno and Javanese Sovereignty Concept Case Study: Guided Democracy Era. *Parapolitika: Journal of Politics and Democracy Studies*, 2(2), 67–79.
- Rizaldy, M. (2020). Sukarno dan Pembangunan Stadion Gelora Bung Karno di Senayan, 1959-1962. *PERIODE: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 2(2), 100–126.
- Trihanondo, D. (2024). Pendekatan Adaptive Reuse pada Ruang dan Fasad Bangunan Modernisme 1960an: Antara Preservasi dan Komersialisasi. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 10(3), 501–510.
- Yulianti, N. R. (2021). *Asian Games IV Tahun 1962 dan Pengaruhnya Terhadap Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin*.
- Yulianti, N. R., Isawati, I., & Pelu, M. (2021). Pengaruh Asian Games IV Tahun 1962 Terhadap Hubungan Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin. *Candi: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah*, 21(1), 51–68.
- Wibisono, C. (2013). *Wawancara imajiner dengan Bung Karno*. Gramedia Pustaka Utama.
- Proyek Mercusuar Sukarno Kompas.com, 5 Oktober 2021
- Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 1961 tentang Pembentukan Panitia Monumen Nasional. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/160713/keppres-no-116-tahun-1961>